

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai *e-audit* yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Anam Masood dan Rab Nawaz Lodhi (2015)

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi anteseden di balik audit yang tidak efektif di tingkat pemerintah. Audit pemerintah membawa arti penting untuk membuat badan pemerintah bertanggung jawab untuk pemanfaatan dana untuk kesejahteraan masyarakat. Di Pakistan, korupsi dan penyalahgunaan dana di tingkat pemerintah terus menghancurkan kepercayaan publik dan kesejahteraan ekonomi. Untuk memperbaiki situasi, perlu untuk membuat audit yang efektif. Peneliti telah mengumpulkan data dari lima belas auditor pemerintah Pakistan melalui tatap muka serta wawancara mendalam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa korupsi besar-besaran, metode audit konservatif, kurangnya kerjasama dari auditee, moral auditor yang rendah, kurangnya kemandirian finansial, kurangnya kekuatan untuk mengambil tindakan terhadap malpraktek, kurangnya keuangan, teknologi dan sumber daya manusia, kurangnya pelatih berkualitas dan lembaga pelatihan yang tidak efektif adalah anteseden audit yang tidak efektif yang akhirnya membuat sulit untuk membawa transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Disarankan bahwa Parlemen harus

memfasilitasi auditor pemerintah melalui ketersediaan sumber daya yang cukup, pelatihan dan peluang pertumbuhan.

Persamaan :

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini meneliti mengenai proses audit pada pemerintahan yang dilakukan Supreme Audit Institution;
2. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini mengungkapkan keunggulan penerapan perkembangan teknologi terhadap proses audit.

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu meneliti mengenai faktor-faktor dibalik audit yang tidak efektif, sementara penelitian saat ini lebih terfokus pada adanya penerapan sistem audit berbasis elektronik;
2. Penelitian terdahulu fokus pada penggunaan teknologi pada proses audit untuk mengurangi adanya korupsi, penelitian saat ini fokus pada adanya penerapan teknologi informasi yang diimplementasikan pada proses audit yang dilakukan oleh BPK RI.

2. Dewi Nindyastuti dan Endang Kiswara (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor efektivitas sistem *e-audit* di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan metode *non probability* melalui studi kasus dengan populasi responden yaitu pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan *e-audit* sebanyak 17 orang. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian menggunakan SPSS 19 dengan jenis uji non parametrik berupa uji

normalitas dengan *Shapiro Wilk*, serta pengujian hipotesis dengan uji korelasi *Pearson Product Moment*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel temuan audit, persepsi kemudahan, persepsi manfaat, kualitas sistem, serta kualitas informasi dengan efektivitas sistem *e-audit*. Sedangkan kompetensi pemeriksa tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem *e-audit*. Temuan penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa efektivitas sistem *e-audit* dapat tercapai jika dilakukan peningkatan akan kemudahan penggunaan sistem *e-audit* bagi pemeriksa di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Persamaan :

Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, keduanya meneliti mengenai *e-audit* yang dilakukan oleh BPK RI.

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif;
2. Subjek pada penelitian terdahulu adalah BPK RI perwakilan Jawa Tengah, sedangkan subjek penelitian ini merupakan BPK RI perwakilan Jawa Timur;
3. Penelitian terdahulu meneliti faktor-faktor efektivitas pada sistem *e-audit*, sedangkan penelitian ini menganalisis perkembangan penerapan sistem *e-audit*.

3. Reem Okab (2013)

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi peran audit elektronik dalam mencapai keunggulan kompetitif dan dukungan strategi audit eksternal yang digunakan oleh kantor audit di Yordania dengan menguji satu set hipotesis mengenai peran audit elektronik dalam mencapai dimensi keunggulan kompetitif di audit kantor dan mendukung strategi audit. Studi ini mengidentifikasi kendala yang menghambat manfaat dari menggunakan Audit elektronik yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan strategi audit dukungan diikuti oleh kantor audit di Yordania. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif yang didasarkan pada mempelajari fenomena seperti itu pada kenyataannya telah digunakan. Hasil penelitian menyimpulkan :

1. Ada signifikansi statistik antara *e-audit* dan mencapai dimensi keunggulan kompetitif kantor audit terletak di Yordania. Tanggapan responden telah menunjukkan bahwa *e-audit* kontribusi untuk mencapai keunggulan kompetitif sebagai berikut: pengurangan biaya, kualitas, pangsa pasar, kreativitas dan keunggulan;
2. Ada signifikansi statistik antara *e-audit* dan strategi dukungan audit dari kantor audit yang terletak di yang Kerajaan Yordania;
3. Ada hambatan yang menghalangi manfaat dari menggunakan *e-audit* yang mencapai keunggulan kompetitif dan Strategi audit digunakan di kantor-kantor audit terletak di Hashemite kerajaan Yordania termasuk biaya software elektronik khusus audit dan perlunya mengorganisir *e-audit* dalam hal mengeluarkan peraturan dan standar yang mengatur *e-audit*;

4. Biaya pembelian program audit elektronik, mengembangkan mereka atau modernisasi program elektronik yang diperlukan auditor memenuhi syarat dalam program yang paling penting dan aplikasi, merupakan salah satu kendala menggunakan *e-audit*.

Persamaan :

1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti mengenai penerapan sistem *e-audit*;
2. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dalam metode penelitian;

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu Yordania dan Indonesia;
2. Penelitian terdahulu meneliti mengenai peran *e-audit* dalam pencapaian keunggulan kompetitif di Kantor Audit Yordania, sedangkan penelitian saat ini meneliti mengenai perkembangan sistem *e-audit* yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur.

4. Dale Stoel, Douglas Havelka dan Jeffrey W. Merhout (2012)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis atribut yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya yang diduga mempengaruhi kualitas teknologi informasi (TI) proses audit. Peneliti mengikuti proses eksplorasi informasi mengidentifikasi atribut potensial (*survey item*) berdasarkan survei baik

sebelum atau pekerjaan lain di mana atribut dapat diidentifikasi dan dikembangkan untuk mengukur konstruk terkait. Peneliti kemudian meminta satu set luas praktisi berpengalaman dan berpengalaman untuk mengambil survei untuk mengevaluasi dampak relatif dari masing-masing indikator terhadap kualitas audit TI. Berikutnya, peneliti menggunakan hasil survei untuk menganalisis skor setiap atribut dan untuk melakukan analisis faktor untuk merasionalisasi atribut dan menentukan komponen yang mendasari. Akhirnya, peneliti membandingkan hasil peneliti untuk literatur sebelumnya untuk persamaan dan perbedaan antara penelitian kualitas audit keuangan dan kualitas audit TI. Salah satu item dari catatan adalah bahwa peneliti tidak memberikan definisi dari kualitas audit TI dalam bahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan responden untuk meresmikan pandangan mereka sendiri "kualitas audit TI" dan menilai pentingnya masing-masing item sesuai tanpa bimbingan potensial dari definisi tunggal.

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan Carcello *et al.* (1992) peneliti menemukan dua faktor, pengalaman industri mereka dan keterlibatan eksekutif, menjadi kurang jelas. Dalam kedua kasus item yang mewakili faktor-faktor ini tampaknya memuat ke daerah-daerah di mana kemampuan akan dimanfaatkan. Sebagai contoh, peneliti menemukan industri pengalaman item dalam faktor pengetahuan proses bisnis serta faktor pengalaman auditor. Tampaknya konsep umum pengetahuan industri termasuk dalam memahami bagaimana proses mungkin unik dan dalam membandingkan sistem dan teknologi yang spesifik dengan norma-norma industri. Selain itu, "*Quality Control*" Faktor ditemukan

oleh Carcello *et al.* (1992) tidak didukung sebagai faktor terpisah dalam analisis peneliti; Namun, hal ini dapat dilihat sebagai suatu aspek dari faktor Kerja lapangan peneliti atau Perencanaan dan Metodologi.

Persamaan :

Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama meneliti mengenai sistem audit berbasis teknologi informasi.

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan yang berbeda;
2. Penelitian terdahulu terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi informasi pada proses audit, penelitian saat ini terfokus pada penerapan dari sistem teknologi informasi itu sendiri;

5. Agung Dwi Hartoyo (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya peningkatan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan menggunakan *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs). Penelitian ini mengungkapkan dengan adanya nota kesepahaman yang dilakukan oleh BPK RI dengan sejumlah Kementerian Negara tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, merupakan upaya dilakukannya *e-audit* sebagai wujud penggunaan CAATs. Dimana dengan diimplementasikannya *e-audit*, BPK RI diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih efektif

dan efisien yaitu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan mendukung terwujudnya tata kelola yang baik atas pelaksanaan tugas utama BPK RI.

Hasil penelitian ini mengungkapkan Penerapan CAATs dalam hal ini implementasi *e-audit* merupakan langkah penting BPK RI dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai keberhasilan dalam penerapannya, BPK RI perlu memberikan program pelatihan secara berkesinambungan bagi seluruh auditor yang ada. Selain itu, BPK RI juga perlu melakukan pengembangan dan perbaikan infrastruktur sistem informasi yang dapat mendukung penerapan CAATs dalam hal ini *e-audit*. Sehingga, penggunaan CAATs bagi BPK RI dalam melakukan pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja auditor yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan.

Persamaan :

1. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai *e-audit* yang dilaksanakan oleh BPK RI;
2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif.

Perbedaan :

Penelitian terdahulu lebih terfokus pada perwujudan CAATs dalam sistem *e-audit*, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap penerapan *e-audit* yang dilaksanakan oleh BPK RI.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. **Audit**

Definisi audit menurut Mulyadi (2002:9), suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sedangkan menurut Arens *et al* (2000:9), proses audit merupakan proses yang ditempuh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi dari suatu Entitas untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2004:10) jika ditinjau dari luas pemeriksaan, maka jenis audit dibagi menjadi :

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

Sedangkan, jika ditinjau berdasarkan jenis pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan menjadi :

1. Audit Operasional (*Management Audit*) atau yang biasa disebut *functional audit*, yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah diatur oleh manajemen, dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis atau belum.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Elektronic Data Processing* (EDP).

Sedangkan untuk sektor publik, proses audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2014 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara yang memberikan wewenang terhadap BPK RI, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan lingkup sebagai berikut :

1. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
2. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasaran secara efektif. Laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan, simpulan dan rekomendasi.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

2.2.2. Dampak Teknologi Informasi Pada Proses Audit

Menurut Willian *et al* dalam David Suharto (2015), teknologi informasi merupakan:

Istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video.

Sedangkann Martin *et al.* (2002:1) mendefinisikan teknologi informasi sebagai teknologi komputer yang digunakan baik memproses maupun menyimpan informasi, serta teknologi komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Teknologi informasi terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Perkembangan teknologi terjadi mulai dari perkembangan infrastruktur teknologi informasi seperti *hardware, software, storage* (teknologi penyimpanan), maupun teknologi komunikasi (Laudon, 2006:174). Adanya perkembangan teknologi telah merubah pola penyimpanan maupun pendistribusian informasi menjadi lebih mudah dan sederhana. Oleh karena itu, perkembangan ini mempengaruhi berbagai aspek mulai dari dunia bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan.

Semakin maju teknologi informasi, semakin banyak pengaruhnya terhadap berbagai bidang termasuk bidang akuntansi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perkembangan sistem akuntansi seperti Sistem Informasi Akuntanssi (SIA) maupun proses akuntansi berbasis komputer lainnya. Kemajuan teknologi tersebut mempengaruhi berbagai hal termasuk pengolahan data, pengendalian internal, serta proses pelaporan laporan keuangan. Kemajuan teknologi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi proses audit. Proses

audit tidak hanya sekedar memeriksa laporan keuangan, akan tetapi juga harus memastikan sistem akuntansi yang digunakan oleh suatu Entitas.

Auditor perlu memastikan apakah sistem tersebut benar-benar memberikan informasi yang layak. Begitu pula dengan penilaian risiko pengendalian yang dilakukan oleh auditor. Auditor harus memahami sistem pengendalian internal Entitas untuk dapat memberikan opini. Sehingga terdapat proses audit guna memeriksa sistem informasi yang digunakan oleh Entitas yang biasa disebut dengan Audit Sistem Informasi.

Selain itu terdapat pula berbagai macam dampak lainnya seperti adanya *Electronic Data Processing* (EDP) dalam metode audit. Metode ini memungkinkan auditor untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan fasilitas komputer atau yang biasa dikenal dengan sebutan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Teknologi akan terus mempengaruhi proses audit, hal ini menyebabkan auditor dituntut untuk memahami perkembangan teknologi informasi.

2.2.3. *Technology Acceptance Model* (TAM)

Terdapat beberapa model yang dibangun untuk menganalisis faktor-faktor diterimanya suatu penggunaan teknologi komputer atau sistem informasi, diantaranya tercatat pada berbagai literatur dan referensi seperti *Theory of Reasoned Action* (TRA), *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Penelitian ini didasarkan pada TAM yang dikembangkan oleh Davis (1989), dimana Tingkat Penerimaan Pengguna

Teknologi Informasi (*Information Technology Acceptance*) ditentukan oleh 6 konstruk yaitu Variabel dari Luar (*External Variables*), Persepsi Pengguna terhadap Kemudahan dalam Menggunakan Teknologi Informasi (*Perceived Ease of Use*), Persepsi Pengguna terhadap Kegunaan Teknologi Informasi (*Perceived Usefulness*), Sikap Pengguna terhadap Penggunaan Teknologi Informasi (*Attitude Toward Using*), Kecenderungan Tingkah Laku (*Behavioral Intention*) dan Pemakaian Aktual (*Actual Usage*).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Natalie Tangkie mengenai “Analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Dengan Menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI”. Peneliti melakukan analisis penerapan sistem *e-audit* menggunakan empat konstruk utama dari TAM yang digunakan pada penelitian Natalie Tangkie, yaitu Persepsi Pengguna terhadap Kemudahan dalam Menggunakan Sistem (*Perceived Ease of Use*), Persepsi Pengguna terhadap Kegunaan Sistem (*Perceived Usefulness*), Sikap Pengguna terhadap Penggunaan Sistem (*Attitude Toward Using*), dan Penerimaan Pengguna terhadap Sistem (*Acceptance of System*). Konstruk TAM yang digunakan peneliti sesuai dengan yang digunakan oleh Natalie Tangkie pada penelitian terdahulu, dimana Penerimaan Pengguna (*Acceptance of System*) terbentuk dari Kecenderungan Tingkah Laku (*Behavioral Intention*) dan Pemakaian Aktual (*Actual Usage*).

a. *Perceived Ease of Use*

Menurut Davis (1989), *perceived ease of use* sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer

dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Davis (1989) dalam penelitiannya mengukur *perceived ease of use* menggunakan indikator pertanyaan mengenai *Easy of Learn, Controllable, Clear & Understandable, Flexible, Easy to Become Skillful, dan Ease to Use*. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan indikator kemudahan sistem untuk dipelajari, fleksibel, kemampuan sistem dalam mengontrol pekerjaan, serta kemudahan sistem untuk digunakan.

b. *Perceived Usefulness*

Gahtani dalam Davis (2001) menyatakan *Perceived Usefulness* atau kegunaan yang dirasakan didefinisikan sebagai suatu tingkat atau keadaan dimana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Davis (1989) mengukur *perceived usefulness* melalui indikator seperti *Work More Quickly, Job Performance, Increase Productivity, Effectiveness, Makes Job Easier, dan Useful*. Peneliti mengukur *Perceived Usefulness* menggunakan pertanyaan seputar kemampuan sistem untuk meningkatkan kinerja pekerjaan, kemampuan sistem untuk menjadikan mempermudah pekerjaan serta keseluruhan teknologi yang digunakan dirasakan lebih bermanfaat.

c. *Attitude Toward Using*

Davis (1989), mendefinisikan *attitude toward the system*, yang dipakai dalam TAM sebagai suatu tingkat penilaian terhadap dampak yang dialami oleh seseorang bila menggunakan suatu sistem tertentu dalam pekerjaannya. Natalie Tangkie dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Attitude toward the system* dapat diukur dengan bagaimana sikap pengguna terhadap sistem, apakah pengguna

merasa senang dalam penggunaan sistem tersebut maupun mengakui perlunya sistem tersebut untuk meningkatkan pekerjaannya.

d. *Acceptance of System*

Natalie Tangkie menyederhanakan konstruk *Behavioral Intention* dan *Actual Usage* menjadi *Acceptance of System*. Natalie Tangkie melakukan modifikasi ini sesuai dengan TAM yang digunakan oleh Said Al-Gahfani dalam penelitiannya "*The Applicability of TAM outside North America : An Empirical Test in the United Kingdom*" (Said Al-Gahtani 2001). *Acceptance of System* diukur dengan menggunakan pertanyaan seputar penerimaan pengguna terhadap sistem yang dialikasikan

2.2.4. E-audit

Guna meningkatkan proses kinerjanya, BPK RI mengimplementasikan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam sistem pemeriksaannya atau yang disebut dengan *e-audit*. *E-audit* merupakan siste pengawasan melalui pusat data BPK yang menghubungkan sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi auditee atau pihak yang diperiksa oleh BPK seperti lembaga-lembaga negara, pemerintahan daerah, BUMD, BUMN, dan lain-lain. Dengan adanya sistem yang membentuk sinergi tersebut, BPK dapat melakukan monitoring data guna pemeriksaan laporan keuangan negara sehingga proses pemeriksaan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien dan memiliki cakupan yang lebih luas.

Setelah diterapkannya sistem *e-audit*, hal ini diharapkan akan mewujudkan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) antara BPK dan Entitas-Entitas yang diperiksa BPK. SNSI ini sendiri diharapkan mampu menciptakan pusat data keuangan negara yang terintegrasi. Jadi, seluruh data, baik keuangan maupun nonkeuangan semua Entitas yang diperiksa BPK masuk ke dalam Pusat Data BPK.

Penerapan *e-audit* merupakan salah satu Inisiatif Strategis yang terdapat pada Rencana Implementasi Renstra BPK (RIR) 2011-2015. Secara umum, kegiatan penerapan *e-audit* yang tercantum pada Inisiatif Srategis tersebut meliputi :

- a. Menyelaskan Grand Design dan Road Map *e-audit*
- b. Mengidentifikasi data Entitas yang diperlukan, baik data elektronik maupun data non elektronik yang nantinya dapat diolah menjadi data berbasis TI
- c. Mengembangkan portal *e-audit* serta memanfaatkan data Entitas dan melengkapi database Entitas untuk kegiatan pemeriksaan
- d. Melakukan sosialisasi *e-audit* kepada pihak-pihak terkait termasuk membuat nota kesepahaman dengan Entitas-Entitas auditee
- e. Melakukan *review* terhadap kesiapan TI baik pihak BPK maupun pihak Entitas auditee, serta mempersiapkan perangkat lunak dan perangkat keras TI terkait penerapan *e-audit*. (Rencana Implementasi Renstra BPK RI 2011-2012)

Sistem *e-audit* yang dilaksanakan oleh BPK RI memiliki empat komponen utama, antara lain :

1. Komponen Penyajian Informasi dan Korespondensi
 - a. Portal *e-audit*, yang merupakan aplikasi berbasis website yang berfungsi sebagai media utama pihak internal BPK dan pihak Entitas terperiksa dalam mengakses berbagai informasi terkait pemeriksaan. Dalam portal *e-audit* ini tidak ada proses komunikasi antar Entitas, karena Entitas hanya dapat mengenal dan berkomunikasi dengan e-BPK dan dengan data Entitas yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan portal *e-audit* bagi Entitas bersifat *Mutual Exclusion Data Exchange* dengan BPK. Sedangkan mekanisme keamanan atas informasi pada portal *e-audit* adalah melalui peretujuan, otorisasi, otentifikasi, dan pemisahan informasi.
 - b. Command server, digunakan sebagai jembatan bagi pemeriksa untuk menggunakan pusat data BPK melalui Portal *e-audit*. Command server merupakan sebuah ruangan khusus yang dilengkapi dengan beberapa *workstation* atau komputer yang berhubungan dengan sistem *e-audit*. Di dalam command center terdapat fungsi *end user computing* yaitu suatu sistem untuk mengembangkan sarana otomatis dan membuat pelaporan sendiri berbasis Teknik Audit Berbantu Komputer (TABK). Beberapa *software* berbasis TABK yang telah disiapkan sebagai alat bantu pemeriksa dalam menganalisis data adalah ACL, Arbutus, dan MS. Excel.

2. Pusat Data

Merupakan pusat pengumpulan dan pengolahan data mentah atau data olahan dari Entitas yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pusat Data terdiri dari tiga sub komponen, antara lain :

- e. *BPK Data Service*, digunakan untuk pengolahan data elektronik pada pusat data sesuai dengan alur proses yang telah didefinisikan oleh sistem. Komponen ini berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi dengan database sehingga antara aplikasi dan database tidak berhubungan secara langsung. Komponen ini juga berfungsi untuk menjalankan fitur otomatisasi proses pemeriksaan di BPK.
- f. *Data Warehouse*, terdiri dari *database* dan fungsi-fungsi perancangan struktur data pelaporan dan penyajian data analisis sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan. dalam pembentukannya, *data Warehouse* dalam sistem *e-audit* dibangun dengan mengelompokkan data menurut Entitas (Kementrian/Lembaga dan Bank Indonesia/BUMN/BUMD/BLU/BLUD, dan Pemerintah Daerah).
- g. *Data Quality Management*, terdiri dari beberapa fitur yang dapat melakukan standarisasi data dari beberapa sumber. Fitur tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi duplikasi dengan berbagai tingkat kemiripan, memberikan saran atau pemilihan data yang dianggap paling akurat, serta menyediakan tempat penyimpanan sementara bagi data yang tidak konsisten sebelum dilakukan standarisasi. Fitur ini membantu BPK untuk mendapat data yang bersih dan siap digunakan.

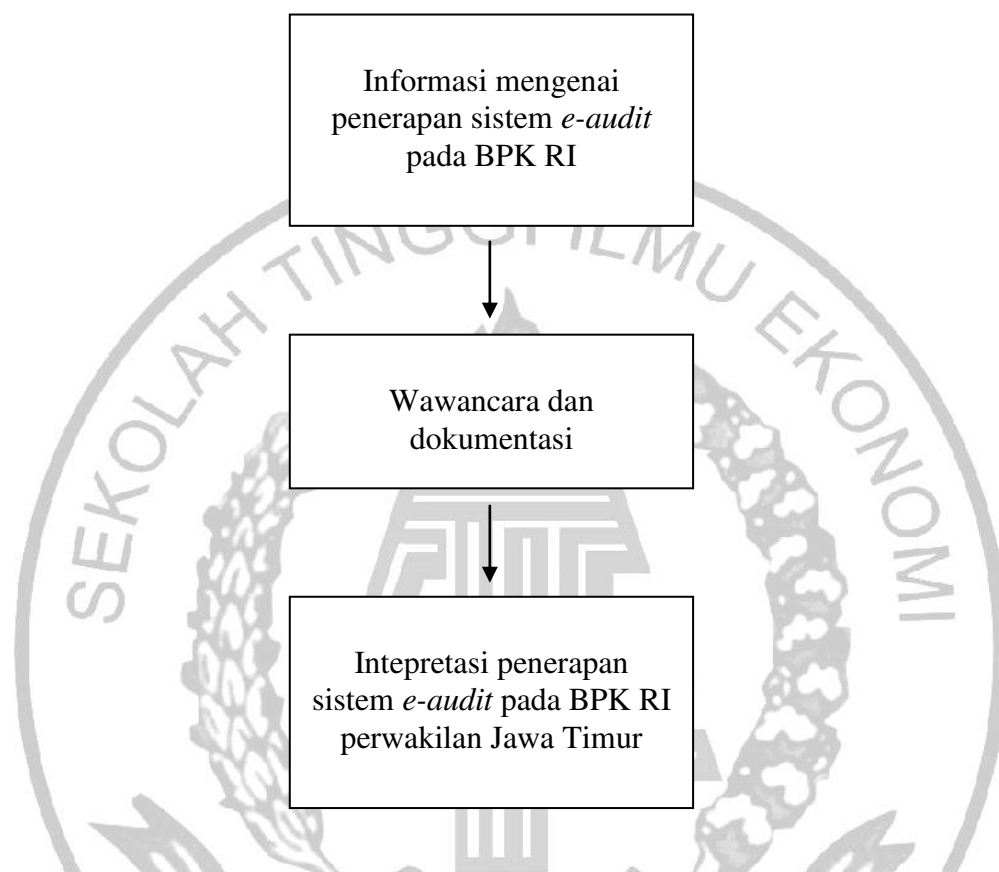
3. Master Agen Konsolidator dan Agen Konsolidator

Komponen ini merupakan sepasang aplikasi yang berfungsi sebagai ETL (extract, transform, load) dari sumber data yang ada di *database* Entitas ke pusat data BPK. Komponen ini dikembangkan untuk mengkonsolidasikan data elektronik dari Entitas ke Pusat Data BPK melalui saluran komunikasi yang disepakati bersama. Fitur ini dapat memberikan *early warning system* dalam bentuk notifikasi secara otomatis ketika proses ETL setelah pengiriman data dan identifikasi tidak sesuai terhadap hasil konsolidasi data Entitas dalam sistem *e-audit*.

4. *Document Management*

Document Management merupakan sistem yang memproses dokumen non elektronik pemeriksaan seperti dokumen *hardcopy* Laporan Keuangan menjadi dokumen elektronik serta mengelola dokumen elektronik kegiatan pelaksanaan pemeriksaan, termasuk Kertas Kerja Pemeriksaan Elektronik. *Document Management* meliputi kegiatan penyimpanan, penomoran, indexisasi, publikasi, tracing, pencarian, dan pengarsipan dokumen elektronik. (Laporan Tahunan BPK RI, 2014).

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan, BPK RI memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ke dalam sebuah sistem yang disebut *e-audit*. Pelaksanaan *e-audit* telah dibangun sejak tahun 2011 dan diterapkan secara penuh pada tahun 2015. Peneliti meneliti tentang bagaimana penerapan sistem *e-audit* oleh BPK RI perwakilan Jawa Timur. Untuk memperoleh data mengenai sistem *e-audit* oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur,

peneliti melakukan wawancara kepada perwakilan BPK RI Jawa Timur secara langsung. Setelah data diperoleh, maka akan dilakukan pengujian validitas atau kredibilitas data dengan cara triangulasi teknik.

Triangulasi teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan data dari hasil wawancara serta dokumentasi. Setelah proses pengujian validitas, peneliti melakukan analisis data terhadap data yang telah diperoleh tersebut. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode analisis data Miles dan Huberman. Analisis data akan dilakukan dalam tiga jalur, meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah melakukan serangkaian analisis data tersebut, peneliti dapat memberi gambaran atau menginterpretasikan penerapan sistem *e-audit* pada BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

